

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMDA KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA

Oleh:

Sudirman Pauwah¹

Ivonne Saerang²

Silvy Mandey³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister Manajemen

Universitas Samratulangi, Manado

email: ¹dimanpauwah@yahoo.co.id

²ivonesaerang@yahoo.com

³silvyamandey@rockedmail.com

ABSTRACT

Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan tersebut, maka semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemda sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, untuk tahun anggaran 2008 sampai tahun 2012. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2008 sampai 2012. Pengujian dilakukan dengan menggunakan empat variabel, kemandirian daerah, efektifitas, aktifitas, dan *debt service coverage ratio* (DSCR), untuk mengukur tingkat kinerja keuangan dari tiap-tiap variabel. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sula berdasarkan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktifitas, rasio pengelolaan belanja, rasio pertumbuhan, berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD. Analisis rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten kepulauan Sula dapat dikategorikan cukup baik karena pertumbuhan PAD masih fluktuatif, artinya kemampuan Pemda dalam meningkatkan pertumbuhan PAD perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Disamping itu perlu juga diperhatikan tentang belanja pegawai yang memiliki nilai yang masih cukup besar jika dibanding dengan nilai PAD.

Kata kunci: otonomi, kemandirian, kinerja keuangan

ABSTRACT

Giving of autonomy to regency area and city based on the principle of decentralization in broad autonomy form, obvious, and responsible. The authority giving based on the principle of decentralization mentioned. The all of the government areas has handed to territory in order for implementing autonomy that basis of the authority and responsible absolute of government regency area and city that related to act of determining policy, Planning, controlling, restraining, and evaluation. The researching purpose To know the performance of financial regency in Sula islands province north Maluku to consideration year 2008 until 2012. Methods of data analysis, to determine the financial performance of local government district sula islands in 2008 until 2012, then tested with four variables, local independence, effectiveness, activity, and Debt service Coverage Ratio (DSCR), to measure the financial performance of each - each variable. Based on the result of analysis be able to take condition that financial management of Sula islands based on ratio independence effectiveness ratio, activity ratio, ratio of expenditure management, growth ratios, effect on the financial management of the regional budget management. From the analysis of the ratio of the district's financial management performance growth Sula islands can be categorized not good enough because it still fluctuating. means revenue growth ability of local governments to increase revenue growth increases. In addition to districts need to be fixed and it should also be noted on personnel expenditures which have considerable value if compared with the value of PAD.

Keywords: autonomy, independence, financial performance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terjadinya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik yang cepat dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak Bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, telah membuka era baru bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Seperti yang dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta (2000:49) bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji dan Kaho (1998:124) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi Pemerintah Pusat.

Musgrave dan Musgrave (1993:6-13) mengemukakan bahwa pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Tatanan pemerintah yang mengarah pada diperluasnya otonomi daerah, menuntut kemandirian daerah di dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pemerintahan di daerah menurut prakasa dan aspirasi masyarakat. Untuk mempersiapkan kemandirian daerah tersebut, yang harus dilakukan daerah adalah dengan memperkuat struktur perekonomiannya sehingga pemerintah daerah harus dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangannya agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Komponen PAD Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang di pisahkan, lain – lain PAD yang sah. Dalam hal ini dapat di lihat dari penyusunan/penetapan target tahunan serta perkembangannya. Halim (2004:268)

Tabel 1. Komponen PAD Kabupaten Kepulauan Sula

Komponen PAD	Realisasi			
	2009	2010	2011	2012
Pajak Daerah	1,341,257,445	1,079,752,593	1,680,865,501	5,193,582,400
Retribusi Daerah	3,592,257,419	3,058,568,338	2,575,671,234	3,248,328,548
HPKD,yang dipisahkan	214,775,502	457,142,639	395,658,311	438,840,579
Lain – Lain PAD yang sah	5,001,586,119	3,572,838,087	1,307,018,818	7,364,628,458

Sumber: Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Penelitian Terdahulu

Lindawati (2001:49) melakukan penelitian mengenai kemampuan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan pinjaman. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah DKI Jakarta mampu memberikan dana netto yang disisihkan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan pembangunannya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Debt Service Coverage Rasio (DSCR) rata-rata per tahun sebesar 17,17 di atas ambang batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,5. selanjutnya dengan analisis Batas Maksimum pinjaman (BMP) pemerintah Daerah DKI Jakarta mampu untuk melakukan pinjaman yang lebih besar lagi.

Simatupang (2007:88) melakukan penelitian mengenai evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan indikator efektifitas, efisiensi, perkembangan APBD dan kemampuan keuangan daerah, dengan hasil penelitian bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selanjutnya berdasarkan *Mann-Whitney Test* secara statistik tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota non pemekaran.

Diana (2008:72) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja atas laporan keuangan pemerintah propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indicator kemandirian keuangan daerah, efektifitas, efisiensi, aktivitas dan perkembangan APBD. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk melihat urutan peringkat evaluasi pelaksanaan laporan keuangan pemda propinsi Se-Sumbagsel dan untuk melihat elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa propinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan laporan keuangan Pemda dan hasil analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata kelima propinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Propinsi se-Sumatera bagian Selatan.

Pasrah (2007: 198) telah melakukan penelitian tentang analisis kinerja dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Sumatera Selatan cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertahun adalah 48,50 persen. Selanjutnya variabel kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Machmud, dkk. (2014:2-11) Melakukan Penelitian mengenai Analisis Kinerja keuangan daerah di provinsi Sulawesi utara tahun 2007-2012. Teknik Analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, oraganisasi,keadaan,ataupun prosedur. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara ataupun observasi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Oesi (2013:2-8) melakukan penelitian mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Malang dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2007-2011. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisien, Rasio Aktivitas, Rasio pertumbuhan.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Adalah Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten kepulauan Sula provinsi Maluku Utara Untuk tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Dalam rangka melaksanakan otonomi Daerah sebagaimana diatur undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut, maka semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Darise (2009:2). Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, hampir sepuluh tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Halim (2001: 167).

Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Usman (1998: 63) mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan. Halim (2007: 230) mengungkapkan bahwa kemampuan pemda dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Kinerja Keuangan Daerah dan Pengukurannya

Bastian (2006 : 274) menyatakan secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja (Rai, 2008:17). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi (Mahsun, 2006:25).

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Bastian (2005:274) menyatakan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan

pencahayaan tujuan dimasa yang akan datang.. Secara Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) :

1. Memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan tingkat eksplanasi maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini menganalisis prestasi atau kinerja keuangan dari Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara. Untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Waktu Penelitian 13 Maret 2013

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data series dari Tahun 2008 sampai dengan 2012.

Metode Analisis Data

Metode analisis data, untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten kepulauan sula tahun 2008 sampai 2012, maka dilakukan pengujian dengan empat variabel, kemandirian daerah, Efektifitas, Aktifitas, dan *Debt service Coverage Ratio* (DSCR), untuk mengukur tingkat kinerja keuangan dari tiap – tiap variabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Propinsi Daerah}}$$

Tabel 2. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2008-2012

No	Tahun	Total Pendapatan	Realisasi PAD	Kontribusi PAD
1.	2008	37,201,806,975	39,498,812,806	10,61%
2.	2009	428,371,449,290	416,005,690,130	97,11%
3.	2010	427,494,247,349	372,552,967,532	87,14%
4.	2011	578,001,864,218	467,747,544,971	80,92%
5.	2012	40,000,000,000	16,245,379,985	40,61%
	Jumlah	15,111,069,367,832	1,312,050,405,424	8,68%
	Rata-Rata	3,022,138,735,664	2,624,100,810,848	8,68%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD), (Data di Olah)

Berdasarkan data pada tabel 5.4 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sula sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2008} = \frac{39,498,812,806}{37,201,806,975} \times 100 = 10,61\%$$

Tahun 2009	$\frac{416,005,690,130}{428,371,449,290} \times 100 = 97,11\%$
Tahun 2010	$\frac{372,552,967,532}{427,494,247,349} \times 100 = 87,14\%$
Tahun 2011	$\frac{467,747,544,971}{578,001,864,218} \times 100 = 80,92\%$
Tahun 2012	$\frac{16,245,379,985}{40,000,000,000} \times 100 = 40,61\%$

Menghitung Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Ril Daerah}}$$

Tabel 3. Laporan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2008-2012

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektifitas %
1.	2008	37,201,806,975	39,498,812,806	1,06
2.	2009	13,543,617,900	10,149,876,485	0,74
3.	2010	20,084,000,000	8,168,301,657	0,40
4.	2011	30,000,000,000	5,959,213,864	0,19
5.	2012	40,000,000,000	16,245,379,985	0,40
Rata-Rata Rasio Efektifitas				0.558

Sumber: Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPAD), (Data di Olah).

Tahun 2008	$\frac{39,498,812,806}{37,201,806,975} \times 100 = 1,06\%$
Tahun 2009	$\frac{10,149,876,485}{13,543,617,900} \times 100 = 0,74\%$
Tahun 2010	$\frac{8,168,301,657}{20,084,000,000} \times 100 = 0,40\%$
Tahun 2011	$\frac{5,959,213,864}{30,000,000,000} \times 100 = 0,19\%$
Tahun 2012	$\frac{16,245,379,985}{40,000,000,000} \times 100 = 0,40\%$

Menghitung Rasio Aktifitas

Rasio Aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau pada belanja pembangunan secara optimal.

Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin terhadap APBD}}{\text{Total APBD}}$$

b. Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

Total Belanja Pembangunan terhadap APBD

Total APBD

Tabel 4. Realisasi APBD Kabupaten Sula Tahun Anggaran 2008-2012

No	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
Pendapatan						
1.	PAD	39,498,812,806	10,149,876,485	8,168,301,657	5,935,477,864	16,245,379,985
2.	Bagi Hasil Pajak	1,995,000,000	37,634,670,104	12,578,048,667	43,033,012,295	5,193,582,400
3.	Bagi Hasil					
4.	Bukan Pajak	3,088,500,000	37,634,670,104	12,578,048,667	43,033,012,295	3,248,328,548
5.	DAU	187,500,000	234,455,779,000	236,361,468,000	295,814,339,052	438,843,579
6.	DAK	34,644,994,843	55,421,000,000	28,826,000,000	54,955,000,000	-
7.	Bagi Hasil Pajak Propinsi	3,172,840,041	3,172,840,041	3,213,274,675	-	-
	Lain-Lain					
	Pendapatan Sah	8,402,543,000	8,402,543,000	336,340,000	-	12,052,210,858
	Jumlah pendapatan	278,302,690,699	416,005,690,130	372,552,967,532	467,747,544,971	475,581,080,791
Belanja						
1.	Belanja rutin	190,078,678,023	194,089,736,012	232,375,925,777	271,624,641,789	206,624,641,789
2.	Belanja Pembangunan	220,079,671,756	224,090,717,980	177,613,159,547	163,527,305,604	173,702,062,487

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kepulauan Sula, 2012

a. Rasio belanja rutin terhadap APBD

$$\text{Tahun 2008} : \frac{190,078,678,023}{278,302,690,699} \times 100 = 68,29\%$$

$$\text{Tahun 2009} : \frac{194,089,736,012}{416,005,690,103} \times 100 = 46,65\%$$

$$\text{Tahun 2010} : \frac{232,375,925,777}{372,552,967,538} \times 100 = 62,37\%$$

$$\text{Tahun 2011} : \frac{271,624,641,789}{467,747,544,971} \times 100 = 58,07\%$$

$$\text{Tahun 2012} : \frac{206,624,641,789}{475,581,080,791} \times 100 = 43,44\%$$

Rata-Rata Rasio Belanja Rutin terhadap APBD = 55,76%

b. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD

$$\text{Tahun 2008} : \frac{220,079,671,756}{278,302,690,699} \times 100 = 79,07\%$$

$$\text{Tahun 2009} : \frac{224,090,717,980}{416,005,690,130} \times 100 = 53,86\%$$

$$\text{Tahun 2010} : \frac{177,613,159,547}{372,552,467,532} \times 100 = 47,67\%$$

$$\text{Tahun 2011} : \frac{163,527,305,604}{467,747,544,971} \times 100\% = 131,16\%$$

$$\text{Tahun 2012} : \frac{173,702,062,416}{475,581,080,791} \times 100 = 36,52\%$$

Rata-Rata Rasio belanja pembangunan terhadap APBD 69,65%

Menghitung Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antar periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus/ defisit anggaran.

$$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

Tabel 5. Laporan Surplus/Defisit Anggaran Kabupaten Sula

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
2008	37,201,806,975	39,498,812,806	2,288,005,831
2009	416,005,690,130	418,180,453,992	2,174,763,862
2010	372,552,967,532	409,989,085,324	37,436,117,792
2011	467,747,544,971	435,151,947,393	32,595,597,578
2012	40,000,000,000	16,245,379,985	23,754,620,015

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD), (Data di olah)

Rasio pengelolaan belanja:

$$\text{Tahun 2008} : \frac{37,201,806,975}{39,498,812,806} \times 100 = 0,94\%$$

$$\text{Tahun 2009} : \frac{416,005,690,130}{418,180,453,992} \times 100 = 0,99\%$$

$$\text{Tahun 2010} : \frac{372,552,967,532}{409,989,085,324} \times 100 = 0,90 \%$$

$$\text{Tahun 2011} : \frac{467,747,544,971}{435,151,947,393} \times 100 = 1,07 \%$$

$$\text{Tahun 2012} : \frac{40,000,000,000}{16,245,379,985} \times 100 = 2,46\%$$

Menghitung Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

a. Persentase Pertumbuhan PAD

$$\frac{\text{PAD tahun p} - \text{PAD tahun p-1}}{\text{PAD tahun p-1}} \times 100 \%$$

b. Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

$$\frac{\text{Pendapatan tahun p} - \text{Pendapatan tahun p-1}}{\text{Pendapatan tahun p-1}} \times 100 \%$$

c. Persentase Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah

$$\frac{\text{Belanja rutin tahun p} - \text{Belanja rutin tahun p-1}}{\text{Belanja rutin tahun p-1}} \times 100 \%$$

d. Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan

$$\frac{\text{Belanja pembangunan tahun p} - \text{Belanja pembangunan tahun p-1}}{\text{Belanja pembangunan tahun p-1}} \times 100 \%$$
Tabel 6. Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Sula Tahun anggaran 2008 s/d 2012

No.	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	PAD	39,498,812,806	10,149,876,485	8,168,301,657	5,959,213,864	40,000,000,000
2.	Pertumbuhan PAD		-2,89%	-0,24%	-0,37%	0,85%
3.	Total pendapatan					
4.	Pertumbuhan pendapatan	37,201,806,975	416,005,690,130	372,552,967,532	467,747,544,971	16,245,379,985
			0,91%	-0,11%	0,20%	-27,79%
5.	Belanja rutin	190,078,678,023	194,089,736,012	232,375,925,777	271,624,641,789	206,624,641,789
6.	Pertumbuhan belanja rutin		0,02%	0,16%	0,14%	-0,31%
7.	Belanja pembangunan	220,079,671,756	224,090,717,980	117,613,159,547	163,527,305,604	173,702,062,489
8.	Pertumbuhan belanja pembangunan		0,02%	-0,90%	0,28%	0,05%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kepulauan Sula, 2012. (Data di olah)

Pembahasan**Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD**

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 dapat digolongkan rendah karena realisasi berada rata-rata 8,68% yaitu: pada tahun 2008 sebesar 10,61%, pada tahun 2009 sebesar 97,11% tahun 2010 sebesar 87,14% tahun 2011 sebesar 80,92% dan tahun 2012 sebesar 40,61%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sula berdasarkan rasio kemandirian dapat dikategorikan baik. Hal ini disebabkan nilai rasio kemandirian yang tinggi dengan rata-rata di atas 50% yaitu 63,27%. Walaupun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 rasio kemandirian daerah Kabupaten Sula mengalami penurunan.

Angka rata-rata 63,27% dapat dimaknai bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak tergantung pada pihak eksternal. Artinya peranan pemerintah pusat tidak lagi menjadi dominan. Ini juga menandakan bahwa

pemerintah kabupaten Sula masih cukup aktif dalam menggali potensi-potensi yang dapat menambah PAD kabupaten. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Inisiatif, kreatifitas dan kemauan daerah dilakukan dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah aktif mencari jalan yang dapat memungkinkan mengatasi kekurangan pembiayaannya, kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD juga dapat dikatakan berhasil.

Menghitung Rasio Efektifitas

Perhitungan rasio efektifitas dapat dilihat bahwa efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula kurang karena realisasi PAD dibawah 100 % yaitu pada tahun 2008 sebesar 1,06%, pada tahun 2009 sebesar 0,74% tahun 2010 sebesar 0,40% tahun 2011 sebesar 0,19% dan tahun 2012 sebesar 0,40%. rata-rata dari tahun 2008 s/d 2012 sebesar 0.558%. Angka ini masih di atas 50%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula masih cukup efektif.

Menghitung Rasio Aktifitas

Perhitungan rasio aktifitas diatas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja rutin sehingga rasio pembangunan terhadap APBD rendah. Rasio belanja rutin pada tahun 2008 adalah 68,29% dan rasio belanja pembangunan sebesar 79,07%, pada tahun 2009 rasio belanja rutin 46,65% dan rasio belanja pembangunan 53,86%, rasio belanja rutin pada tahun 2010 62,37% dan rasio pembangunan 47,67%. Pada tahun 2011 rasio belanja rutin 58,07% dan rasio belanja pembangunan 131,16%, pada tahun 2012 rasio belanja rutin 43,44% dan rasio belanja pembangunan 36,52%. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rasio aktifitas pemerintah kabupaten kepulauan Sula lebih memprioritaskan belanjanya, pada belanja rutin dari pada belanja pembangunan. Belanja pegawai/ personalia perlu ditekan oleh pemerintah guna dialokasikan untuk belanja modal/ pembangunan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sula.

Menghitung Rasio Pengelolaan Belanja

Perhitungan rasio pengelolaan belanja diatas dapat dilihat bahwa kinerja pengelolaan belanja yang paling baik adalah pada tahun 2012 yaitu diatas 200% sebesar 2,46% yang menunjukkan adanya surplus sebesar Rp.23,754,620,015. Ini bisa disebabkan karena pemerintah berhasil menekan pengeluaran sebesar Rp.16,245,379,985 dibanding tahun-tahun sebelumnya

Menghitung Rasio Pertumbuhan

Perhitungan dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Sula pada tahun anggaran 2008 s/d 2012 menunjukkan pertumbuhan negatif. Pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sula pada tahun 2009 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya sampai tahun 2012. PAD juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp. 40,000,000,000 pertumbuhan tersebut disebabkan karena meningkatnya realisasi pos-pos PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil analisis rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sula dapat dikategorikan belum cukup baik karena pertumbuhan PAD masih fluktuatif. Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan PAD kabupaten perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Disamping itu perlu juga diperhatikan tentang belanja pegawai yang memiliki nilai yang cukup besar jika dibandingkan dengan nilai PAD.

Penelitian yang dilakukan Oesi (2013), terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan Daerah yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, dan rasio efisien yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negatif seperti rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan. Menurut Mahmud dkk, (2014), Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah provinsi Sulawesi Utara, berpengaruh terhadap sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan rasio kemandirian dapat di kategorikan baik. Hal ini di sebabkan nilai rasio kemandirian yang tinggi di atas rata-rata. Walaupun sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 rasio kemandirian daerah Kabupaten Sula mengalami penurunan.
2. Rata-rata relaisasi PAD Kabupaten Kepulauan Sula masih cukup efektif, tapi Pemda harus cermat mengontrol semua badan dinas yang ada, untuk itu pada periode yang akan datang perlu di usahakan agar penyerapan dana tersebut lebih merata ke masing-masing badan dinas. Karena di lihat dari realisasi PAD dari tahun ke tahun menurun, karena defisit anggaran dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan bahkan pada tahun 2012 Kabupaten Kepulauan Sula mengalami surplus anggaran yakni diatas rata-rata.
3. Ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Sula seperti kemandirian keuangan yang masih rendah dan aktifitas pemerintah dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Kinerja pengelolaan keuangan masih cukup efektif karena pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan PAD kabupaten perlu diperbaiki dan tingkatkan. Disamping itu perlu juga diperhatikan tentang belanja pegawai yang memiliki nilai yang cukup besar jika dibandingkan dengan nilai PAD.

Saran

Saran yang penulis sampaikan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sula antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Sula sebaiknya mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/ propinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sula dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan diimbangi dengan perluasan lapangan kerja di Kabupaten Sula agar pendapatan masyarakat meningkat sehingga retribusi dan pajak yang dibayar masyarakat meningkat pula.
3. Meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat dan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Sula.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Darise Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dan BLU*. (Pengantar Gusnar Ismail dan Idris Rahim). penerbit, Indeks Jakarta.
- Darumurti, K.D dan Rauta, Uumbu, 2000, Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok, *Jurnal Kritis*, Vol. XII, No. 3. Diakses tanggal 06 Januari 2014, Hal. 1-53.
- Diana, Heny F. 2008. Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* <http://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/perbandingan-indikator-kinerja-keuangan-pemerintah-propinsi-se-sumatra-bag-selatan.pdf>. Vol. 14 No. 8. Diakses tanggal 03 januari 2014. Hal. 193 – 229.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPPAMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.

- Pamudji, Kaho, dan Yosef Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Lindawati, Tita, 2001, *Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pinjaman*. Tesis S2 (Tidak dipublikasikan) Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006, dalam Suyana, Utama M. 2007. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001 – 2006. Studi Kasus Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (tidak dipublikasikan). ISSN: 2302-8556 *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.3 (2014):481-497 <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/viewFile/8341/6218>. Diakses tanggal 03 Februari 2014 Hal. 2 – 10.
- Machmud Masita, George Kawung dan Wensy Rompas. 2014 Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di provinsi Sulawesi utara Tahun 2007 – 2012. *Jurnal Efisiensi* Volume 14 No. 2 - Mei 2014, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/4181/3710pdf>. Diakses tanggal 01 Maret 2014, Hal. 1-11.
- Musgrave R.A and Musgrave P.B, 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Oesi Agustina. A, 2014 Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011), *Journal: Prisma*. No.2. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/394/339pdf>, diakses tanggal 24 Januari 2014, Hal 2-8.
- Pasrah, Rudi, 2007, Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, *Kajian Ekonomi*, Vol. 6 No.2, 198-221. <http://rlc.fe.ui.ac.id/pasca/opac/fe/detail.jsp?id=22105&lokasi=lokal>. Diakses tanggal 15 April 2014. Hal. 1–14.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.
- Usman Sugoto, 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. 2004 Jakarta.
- Simatupang, Paula. 2007. *Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis (tidak dipublikasikan) Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.